**PEMERINTAH KOTA BENGKULU**

# RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

# DINAS DP3AP2KB KOTA BENGKULU

# TAHUN 2025-2029

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**KOTA BENGKULU**

**Jalan Musium No. 06 Kota Bengkulu**

## LEMBAR PENETEPAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2025-2029.
2. Keputusan walikota Bengkulu Nomor ….. Tahun 2025 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2029.

Dengan ini menetapkan :

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BENGKULU**

**TAHUN 2025 - 2029**

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu

Hj. DEWI DHARMA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670505 199503 2 001

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu tahun 2025-2029 dalam rangka ikut serta dalam mewujudkan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Bengkulu.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Bengkulu tahun 2025-2029 disusun sesuai tahapan dan tata cara berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Bengkulu tahun 2025-2029 berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang di selaraskan dengan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Bengkulu dalam RPJMD dan merupakan upaya yang harus di wujudkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Bengkulu ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaaan program di masa yang akan datang. Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Bengkulu

**Hj. DEWI DHARMA, M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 19670505 199503 2 001

LEMBAR PENETAPAN RENSTRA

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... ii

DAFTAR TABEL ..... iii

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang ……. 2

2 Dasar Hukum Penyusunan…….. 6

3 Maksud dan Tujuan …….. 10

4 Sistematika Penulisan ……..... 11

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

2.1 Gambaran Pelayanan DP3AP2KB ……..... 13

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis DP3AP2KB ..... 33

**BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan**

1 Tujuan Renstra DP3AP2KB 2025-2029..... 36

2 Sasaran Renstra DP3AP2KB .....……..... 36

3. Strategi DP3AP2KB Dalam Mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029 ..... 38

4. Arah Kebijakan DP3AP2KB dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029 .....……..... 38

**BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

1. Uraian Program ..... 46
2. Uraian Kegiatan ..... 47
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif ..... 61
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas ..... 71
5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama ..... 76
6. Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah 2025-2029 melalui indikator Kinerja Kunci ..... 77

**BAB V Penutup .....** ..... 79

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Secara hakiki, Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti tercantum dalam alinea pertama pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Lebih khusus lagi tujuan pembangunan nasional memiliki sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat utamanya adalah "pengentasan kemiskinan". Untuk mencapai tujuan tersebut tentu saja harus direncanakan dan dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan.

Tujuan, program dan kegiatan pembangunan Nasional tersebut dapat diwujudkan apabila tepat dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 (4) menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun harus melibatkan seluruh pihak terkait, utuh dan terpadu. Perencanaan Pembangunan Nasional juga harus bisa menciptakan hubungan yang serasi dan

selaras antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Hal ini seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 2 (2) yang menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu adalah dokumen

Perencanaan untuk Periode 5 ( Lima) Tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AP2KB berpedoman pada RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan salah satu perangkat daerah (PD) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, mempunyai kewajiban menyusun perencanaan kegiatan, baik perencanaan jangka menengah (Rencana Strategis) maupun perencanaan tahunan (Rencana Kerja).

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra DP3AP2KB Kota Bengkulu Tahun 2025 - 2029 ini dalam penyusunannya dilakukan secara teknokratis, partisipatif dan politis.

Dalam penyusunan Renstra ini diawali oleh kajian dan analisis oleh Tim Renstra yang berasal dari unsur DP3AP2KB dan Tenaga Ahli terhadap tugas pokok dan fungsi pelayanan DP3AP2KB. Analisis ini didasarkan pada dokumen dan peraturan perundangan yang terkait dengan penyusunan Renstra serta analis lingkungan internal dan eksternal DP3AP2KB. Partisipatif diartikan bahwa proses penyusunan Renstra telah melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan DP3AP2KB serta mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Politis berarti penyusunan Renstra didasarkan pada kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bengkulu 2025 - 2029. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini telah menegaskan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. RPJMD inilah yang menjadi dasar pelaksanaan penyusunan Renstra DP3AP2KB Kota Bengkulu Tahun 2025 - 2029.

Sehubungan hal di atas, maka penyusunan rancangan Renstra DP3AP2KB Kota Bengkulu 2025 - 2029 ini merujuk kepada Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Bengkulu Periode 2025 - 2029, yaitu: ***"*Kota Bengkulu Semakin Maju, Religius, Bahagia Dan Berkelanjutan".** Dalam mewujudkan Visinya, telah disusun Misi yang akan dijalankan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kualitas sumber daya manusia yang unggul berdayasaing berlandaskan IPTEK dan IMTAQ
2. Mewujudkan perekonomian yang inklusif berbasis potensi daerah yang berdaya saing.
3. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang adaptif, professional, transparan dan akuntabel serta pelayanan public yang prima.
4. Pembangunan social budaya dan ekologi, serta meningkatnya keamanan Masyarakat dan penegakan demokrasi.
5. Meningkatkan Pembangunan merata dan berkeadilan, serta infrastruktur ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Misi Walikota Bengkulu yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB adalah misi ke 1

Penyusunan dokumen Renstra DP3AP2KB Kota Bengkulu dilakukan melalui beberapa tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan sebagaimana diatur di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025, yang mencakup:

a. Persiapan Penyusunan Renstra;
b. Penyusunan Rancangan Awal Renstra;
c. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra;
d. Perumusan Rancangan Akhir Renstra;
e. Penetapan Keputusan Tentang Renstra;

Perumusan isi atau substansi Renstra sangat menentukan kualitas dokumen yang dihasilkan.Tersusunnya Renstra ini dimaksudkan untuk:

a. Sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu selama 5 (Lima) tahun;
b. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) DP3AP2KB Untuk menjamin konsistensi pencapaian indikator kinerja pembangunan sesuai dengan

dokumen perencanaan pembangunan lainnya terutama dalam pencapaian Visi dan Misi dokumen RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2025 -2029.

Hubungan Renstra DP3AP2KB dengan dokumen perencanaan lainnya, ditunjukan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1.1.

Hubungan antara RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

**Gambar 1.2.**

**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**

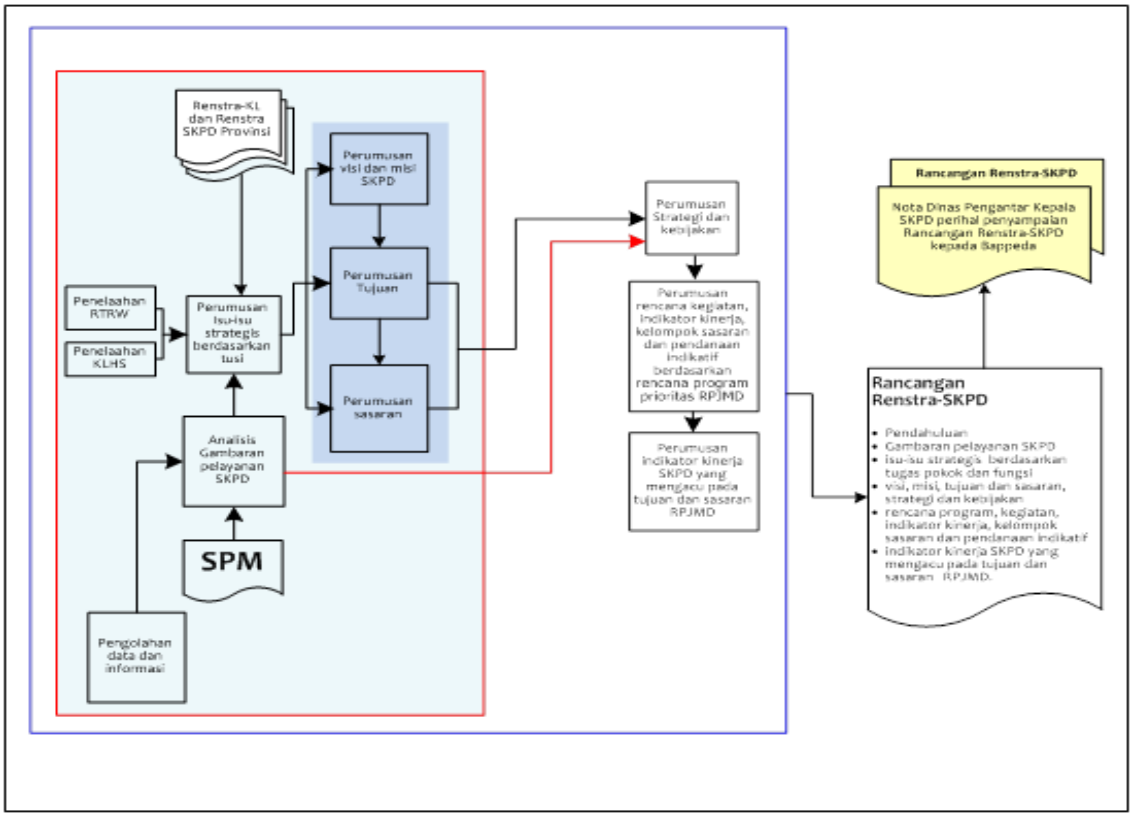


Renstra Organisasi Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Organisasi Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Organisasi Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Organisasi Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Organisasi Perangkat Daerah.

## 2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);

24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
36. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029;
37. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2045;
40. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2029;
41. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6).

### 3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3AP2KB adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas P3AP2KB yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah,
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

**4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I PENDAHULUAN**

BAB ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya Rencana Strategis (Renstra), landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan.

**Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BENGKULU**

BAB ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DP3AP2KB Kota Bengkulu.

Di dalam BAB ini juga menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan DP3AP2KB Kota Bengkulu, telaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah, telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis. 2029 (Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD).

**Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat rumusan tujuan dan sasaran Renstra DP3AP2KB Kota Bengkulu yang hendak dicapai 2029 Termasuk juga tentang pernyataan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra serta arah Kebijakann PD 2025-2029.

**Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat tentang perumusan uraian program, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif **(Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD, Tabel 4.2Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra PD, Tabel 4.3**

**Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan, Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalm mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah)**.

Di dalam BAB ini juga keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 **(Tabel 4.5 Indikator Kinirja utama PD dan Tabel Indikator Kinerja Utama PD dan Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci)**.

**Bab V PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, menjelaskan kaidah pelaksanaan, yang antara lain meliputi penjelasan Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Bengkulu sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), pelaksanaan evaluasi sebagai penguatan peran *steakholders* dalam pelaksanaan rencana kerja DP3AP2KB Kota Bengkulu, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan berdasarkan urusan Pemerintahan Umum yang menjadi urusan pemerintahan daerah yaitu DP3AP2KB Kota Bengkulu.

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BENGKULU

## 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.

### A. Tugas, Fungsi Dan Struktur DP3AP2KB Kota Bengkulu

#### a) Tugas dan fungsi DP3AP2KB

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 tahun 2016 tentang kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Provinsi Bengkulu. Maka di Tahun 2016 badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi Bengkulu berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dengan Tipelogi A.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Bengkulu mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam Bab ini, yang menjelaskan tentang gambaran umum pelayanan Dinas P3AP2KB, diuraikan tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya, Tata Kerja, Capaian Kinerja Pelayanan yang merupakan dasar bagi penyusunan kekuatan dan kelemahan Dinas P3AP2KB serta peluang dan tantangan yang dihasilkan dari analisis Renstra SKPD Propinsi serta Kementerian dan Lembaga terkait.

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah membantu Walikota melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada Kota di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas didukung oleh empat bidang dan sekretariat. Rincian tugas dan fungsi organisasi Dinas P3AP2KB sebagai berikut:

**a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Didalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam mewujudkan hak anak, anak yang memerlukan perlindungan khusus.
4. Pelembagaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan dunia usaha, penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan, keluarga dalam mewujudkan kg dan hak anak dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
5. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan.
6. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
7. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kg dan hak anak.

8. Pengumpulan, pemetaan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan perkiraan pengendalian penduduk.
9. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
10. Pelaksanaan informasi, edukasi, pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal.
11. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB.
12. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB.
13. Pemberdayaan, pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan.
14. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
15. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
16. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas memberi pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
b. Penghimpunan dan penyusunan rencana/program/kegiatan dari masing-masing bidang.
c. Penyusunan rumusan kebijakan di bidang Kesekretariatan.

d. Pemahaman ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas sekretariat.
e. Pemberian petunjuk dan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan dinas.
f. Pengaturan pelaksanaan urusan perlengkapan yang meliputi pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan serta mengajukan usulan untuk penghapusan inventaris.
g. Pengaturan pelaksanaan urusan asset dan urusan umum yang meliputi tugas-tugas protokol, keamanan dan ketertiban, penggandaan/percetakan, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas dan kebersihan lingkungan dinas.
h. Pelaksanaan urusan kepegawaian yang meliputi penyusunan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, pengurusan Sasaran Kinerja Pegawai, pengurusan usulan KARIS dan KARSU, KARPEG, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan untuk tiap-tiap akhir tahun dan penilaian angka kredit.
i. Pengaturan pelaksanaan urusan keuangan yang meliputi tata usaha keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan.
j. Penyiapan bahan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
k. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sekretariat.
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas :

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub bagian Penyusunan Program.
3. Sub bagian Keuangan.

C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan.
b. Pemahaman ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang tugas.
c. Penyusunan rumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan.
d. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat.
e. Pelaksanaan dan penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender.
f. Pelaksanaan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
g. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
h. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
i. Penyiapan standarisasi, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga.
j. Pelaksanaan analisis data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
k. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan.
l. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
m. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, terdiri dari :

a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
b. Seksi Pengarusutamaan Gender
c. Seksi Perlindungan dan Peningkatan Hidup Perempuan

D. Bidang Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan kegiatan di bidang perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka(1) Bidang Perlindungan Anak mempunyai Fungsi :

a. Perumusan rencana program dan kegiatan pada Bidang Perlindungan Anak.
b. Penyusunan rumusan kebijakan dibidang perlindungan anak.
c. Pemahaman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Pemberian fasilitasi pengumpulan, pengolahan data dan informasi anak dalam kelembagaan data di tingkat kota.
e. Peidentifikasian dan analis program dan kegiatan perlindungan anak.
f. Pelaksanaan kegiatan advokasi dan sosialisasi kebijakan pemenuhan hak anak.
g. Penguatan kelembagaan dan jejaring pemenuhan hak anak melalui masyarakat, dunia usaha dan akademisi.
h. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Anak.
i. Pengoordinasian pelaksanaan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha.
j. Penyusunan dan penyampaian pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Anak.
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Anak terdiri dari 3 seksi :

a. Seksi Perlindungan Anak
b. Seksi Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak
c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Anak

E. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan Fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
b. Pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
e. Pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
f. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
g. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
h. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
i. Pelaksanaan pendayagunaan petugas lapangan dan tenaga penyuluh KB .
j. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
l. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberi atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri atas:

a. Seksi advokasi dan Penggerakan
b. Seksi penyuluhan dan pendayagunaan petugas lapangan KB dan Kader KB.
c. Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

F. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
b. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga.
c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
d. Pelaksanaan penyelenggaraan norma standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
e. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi.
f. Pelaksanaan pelayanan KB.
g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja
h. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga lansia dan rentan.
i. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga .
j. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB.
k. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
l. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

m. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas:

a. Seksi jaminan ber-KB

b. Seksi pembinaan kesertaan ber-KB

c. Seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pelaksanaan uraian tugas masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Unit Pelayanan Teknis P2TP2A

Unit Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. UPT P2TP2A dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a) Pelayanan perlindungan korban kekerasan;

b) Pengkoordinasian dan fasilitasi pelayanan terpadu penanganan pengaduan, rehabilitasi kesehatan dan social, pemulangan dan reintegrasi social, dan bantuan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga;

c) Pengelolaan rumah perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

d) Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan evaluasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak; dan

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1.2.**

**Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

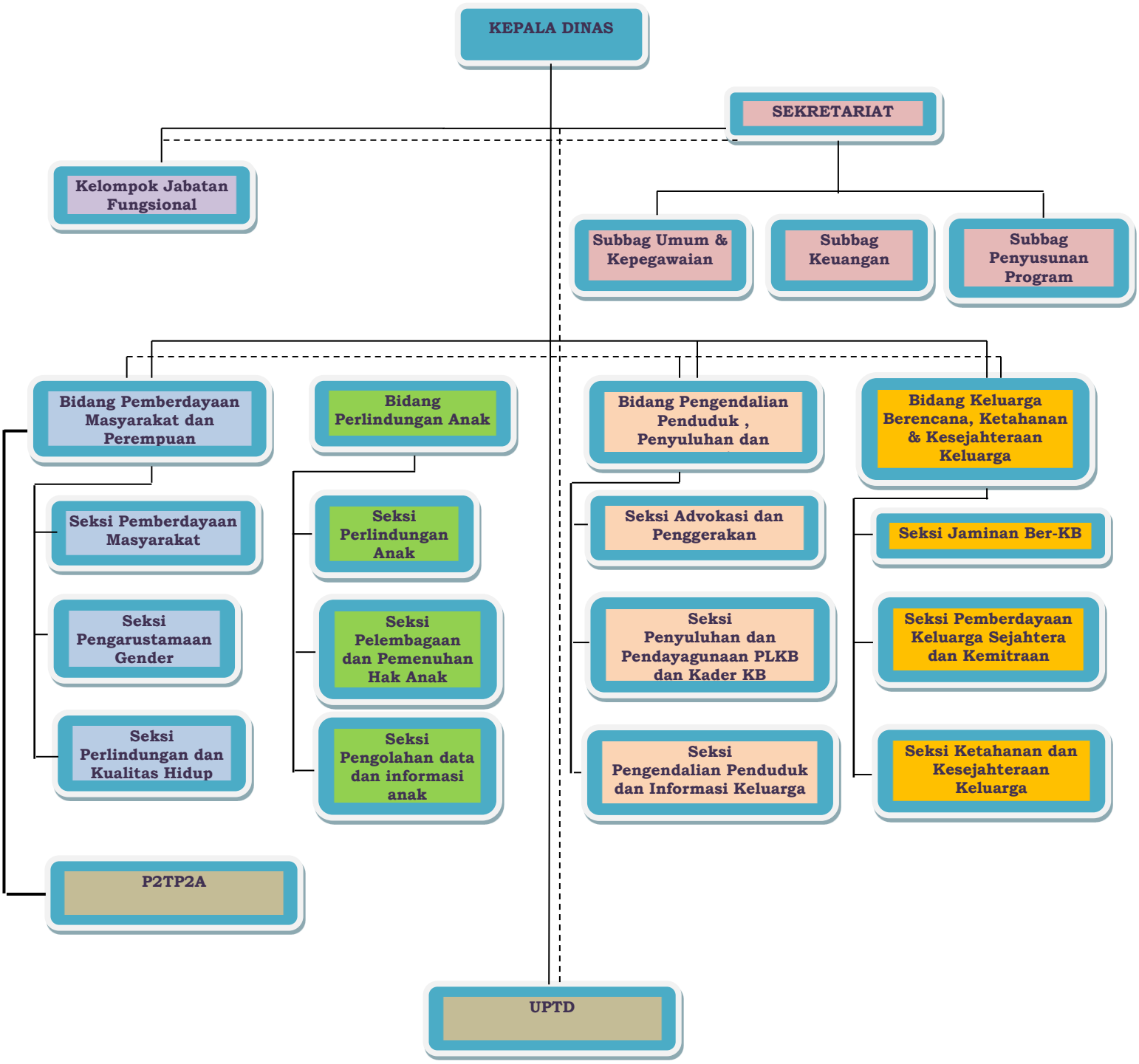


: garis komando

: garis koordinasi

*Sumber: Perbub No 72 thn 2016*

## B. Sumber Daya Perangkat Daerah

### a) Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sumber daya manusia (SDM) yang cukup dan handal menjadi salah satu faktor penting untuk pencapaian keberhasilan tujuan dari perangkat daerah. Adapun mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di perangkat daerah Dinas P3AP2KB, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 2.1**
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**
**di Perangkat Daerah Tahun 2025**

| No | Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLTA | 1 | 1 | 2 |
| 2 | D-1 | - | - | - |
| 3 | Sarjana Muda (D-3) | - | 2 | 2 |
| 3 | Diploma 4 (D-4) | - | 1 | 1 |
| 4 | Sarjana (S-1) | 8 | 14 | 22 |
| 5 | Pascasarjana (S-2) | - | 8 | 8 |
| | ***Jumlah*** | | | ***35*** |

Sumber: Sekretariat (Kepegawaian) Dinas P3AP2KB

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 35 orang PNS yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu, sebanyak 8 (Delapan) orang pegawai berpendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana), 22 (Dua Puluh Dua) orang pegawai berpendidikan Strata 1 (sarjana), 1(Satu) orang pegawai berpendidikan Diploma 4, 2 (Dua) orang pegawai berpendidikan Sarjana Muda, dan 2 orang berpindidikan SITA.

**Tabel 2.2**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

**di Perangkat Daerah Tahun 2025**

| No | Golongan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golongan II/b | - | - | 0 | PNS |
| 2 | Golongan II/c | - | - | 0 | PNS |
| 3 | Golongan II/d | - | 1 | 1 | PNS |
| 4 | Golongan III/ a | 4 | 7 | 11 | PNS |
| 5 | Golongan III/b | 3 | | 3 | PNS |
| 6 | Golongan III/c | 2 | 1 | 3 | PNS |
| 7 | Golongan III/d | 2 | 6 | 8 | PNS |
| 8 | Golongan IV/a | | 6 | 6 | PNS |
| 9 | Golongan IV/b | - | 1 | 1 | PNS |
| 10 | Golongan IV/c | - | 1 | 1 | PNS |
| | Golongan V | 1 | | 1 | P3K |
| | Golongan IX | | 1 | 1 | P3K |
| | ***Jumlah*** | ***12*** | ***23*** | ***35*** | |

Sumber: Sekretariat (Kepegawaian) Dinas P3AP2KB 2025

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan golongan rata-rata Pegawai berada di golongan III, sedangkan untuk pegawai P3k berada di golongan V dan IX.

**b) Sarana dan Prasarana (Asset)**

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki perangkat daerah Dinas P3AP2KB

**Tabel 2.3**

**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi**

**di Perangkat Daerah Tahun 2025**

| NO | Nama Inventaris | Jumlah | Kondisi |
|---|---|---|---|
| 1. | Gedung Bangunan Kantor DP3AP2KB | 1 | Baik |
| 2. | Gedung UPT P2TP2A | 1 | Baik |
| 3. | Gedung UPT PLKB | 9 | Baik |
| 4. | Kendaraan Dinas Roda 6 | 1 | Baik |
| 5. | Kendaraan Dinas Roda 4 | 6 | Baik |
| 6. | Kendaraan Dinas Roda 2 | 74 | Baik |
| 7. | Lemari Kayu | 11 | Baik |
| 8. | Meja Rapat | 9 | Baik |
| 9. | Sofa | 3 | Baik |
| 10. | Kipas Angin | 12 | Baik |
| 11. | Exhause Fan | 12 | Yang Bagus 4 buah |
| 12. | P.C Unit | 11 | Baik |
| 13. | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 9 | Baik |
| 14. | Alat Pengangkat Lain-lain Eksekutif | 3 | Baik |
| 15. | Rak Kayu | 5 | Baik |
| 16. | Papan Nama Instansi | 4 | Baik |
| 17. | White Board | 6 | Baik |
| 18. | Kursi Kayu | 4 | Baik |

| NO | Nama Inventaris | Jumlah | Kondisi |
|---|---|---|---|
| 19. | Tempat Tidur Besi/Metal | 1 | Baik |
| 20. | Kursi Putar | 7 | Baik |
| 21. | Tong Sampah | 6 | Baik |
| 22. | AC. Unit | 7 | Baik |
| 23. | Tangga Aluminium | 1 | Baik |
| 24. | Dispenser | 5 | Baik |
| 25. | Meja ½ Biro | 1 | Baik |
| 26. | Meja Jati Pejabat Eselon | 1 | Baik |
| 27. | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 10 | Baik |
| 28. | AC. Split | 9 | Baik |
| 29. | AC. Window | 3 | Baik |
| 30. | AC. Daikin | 2 | Baik |
| 31. | Miyako | 1 | Baik |
| 32. | Penghancur Kertas | 2 | Baik |
| 33. | Papan Nama | 1 | Baik |
| 34. | Bufet Kaca | 1 | Baik |
| 35. | Karpet | 30 | Baik |
| 36. | Kursi Chitose | 200 | Baik |
| 37. | Infocus | 1 | Baik |
| 38. | Lemari Besi/ Metal | 1 | Baik |

| NO | Nama Inventaris | Jumlah | Kondisi |
|---|---|---|---|
| 39. | Pompa Air | 1 | Baik |
| 40. | Alat Pemadam Portable | 2 | Baik |
| 41. | Laptop | 25 | Baik |
| 42. | Printer | 16 | Baik |
| 43. | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 8 | Baik |
| 44. | Kursi Rapat | 9 | Baik |
| 45. | Gordeng | 2 | Baik |
| 46. | Notebook | 4 | Baik |
| 47. | Alat Kesehatan Perawatan Lain-lain | 1 | Baik |
| 48. | Brankas | 1 | Baik |
| 49. | LCD Proyektor | 10 | Baik |
| 50. | Televisi | 3 | Baik |
| 51. | Meja Kerja Pejabat Lainnya | 1 | Baik |
| 52. | Publik Address | 10 | Baik |
| 53. | Papan Struktur | 2 | Baik |
| 54. | Lemari Es | 2 | Baik |
| 55. | Alat Dapur Lain-lain | 1 | Baik |
| 56. | Peralatan Personal Komputer | 3 | Baik |
| 57. | Sound System | 2 | Baik |
| 58. | Facsimile | 1 | Baik |

| NO | Nama Inventaris | Jumlah | Kondisi |
|---|---|---|---|
| 59. | Handphone | 41 | Baik |
| 60. | Papan Data | 12 | Baik |
| 61. | Kursi Plastik | 20 | Baik |
| 62. | Hardisk | 3 | Baik |
| 63. | Kursi Kerja Pejabat Lain-lain | 16 | Baik |
| 64. | Filling Besi/ Metal | 3 | Baik |
| 65. | Alat Penghancur Kertas | 1 | Tidak Baik |
| 66. | Lemari dan Arsip Lain-lain | 1 | Baik |
| 67. | Pesonal Komputer | 3 | Baik |

Sumber : Sekretariat (Bendahara Barang) Dinas P3AP2KB, 2025

**c). Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program/ kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/ kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Sedangkan pencapaian kinerja program/ kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari *input, output, outcome, benefit,* dan *impact*. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pencapaian Kinerja Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4

**Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3AP2KB**

**Kota BengkuluTahun 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio capaian Pada Tahun Ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Persentase Pertumbuhan Penduduk | | | | 1.49 | 1.44 | 1.39 | 1.39 | 1,5 | 1.35 | 1.31 | 1.5 | 1,63 | | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.08 | #VALUE! |
| 2 | Persentase KB aktif | | | | 79 | 80 | 81 | 83 | 80 | 74.16 | 73.2 | 73 | 64.81 | 78.83 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.0 |
| 3 | Indeks Pemberdayaan gender (IDG) | | | | 78 | 79 | 80 | 80 | 77.87 | 77.68 | 77.67 | 77.67 | 77.67 | 75.94 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | Penghargaan Kota Layak Anak | | | | Muda | Muda | Muda | Muda | Madya | Pratama | Pratama | Pratama | Pratama | Pratama | | | | | |
| 5 | Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan kerja | | | | | | | 30 | 30 | | | | 29.55 | 30 | | | | 1.0 | 1.0 |
| 6 | Persentase Keterlibatan perempuan di parlemen | | | | | | | 28.4 | 28.4 | | | | 28.13 | 28.13 | | | | 1.0 | 1.0 |
| 7 | Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan | | | | | | | 21.25 | 21.25 | | | | 21.15 | 21.15 | | | | 1.0 | 1.0 |

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio capaian Pada Tahun Ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Predikat Anugrah Parahita Ekapraya | | | | | | | Pratama | Pratama | | | | NA | Belum Mendapatkan Penghargaan | | | | | |
| 9 | Persentase Kasus Korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 10 | Persentase Kecamatan Layak Anak | | | | | | | | 55 | | | | | 55 | | | | | |

Bengkulu, Juli 2025

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu

**Hj. DEWI DHARMA, M.Si**
Pembina TK.I/IV-c
Nip. 196705051995032001

Data pada tabel memperlihatkan bahwa capaian kinerja Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu dari target capaian renstra tahun 2020 – 2024, pada akhir tahun 2024 capaian tertinggi adalah Persentase Kasus Korban Kekerasan anak yang mendapatkan pendampingan yaitu 100%.

Dari table tersebut diatas terlihat bahwa terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target sesuai yang diharapkan atau rasio kinerjanya masih berada dibawah angka 100 %, meliputi indikator-indikator sebagai berikut :

1. Penghargaan Kota Layak Anak
2. Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan kerja
3. Persentase Keterlibatan perempuan di parlemen
4. Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
5. Predikat Anugrah Parahita Ekapraya

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis DP3AP2KB

### a). Pemetaan Permasalahan DP3AP2KB

Bidang pengendalian penduduk dan perencanaan keluarga masih menghadapi berbagai permasalahan yang mempengaruhi kualitas pembangunan manusia di daerah. Permasalahan utama adalah laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan belum seimbang dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Kondisi ini diperburuk dengan masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya program KB dan pengaturan jarak kelahiran.

Angka unmet need KB (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) masih cukup tinggi, terutama di wilayah pedesaan dan kelompok masyarakat miskin. Akses terhadap pelayanan KB yang berkualitas belum merata, disertai keterbatasan tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana. Di sisi lain, permasalahan kependudukan juga tampak dari kualitas keluarga yang masih rendah, seperti tingginya angka perkawinan usia dini, rendahnya pembinaan ketahanan keluarga, serta meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

1. Masalah Pokok

   Pengendalian penduduk dan pelaksanaan program keluarga berencana belum optimal.

2. Masalah (Turunan dari Masalah Pokok)
   - Laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi.
   - Angka unmet need (kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi) masih tinggi.

- Akses dan kualitas pelayanan KB belum merata, terutama di daerah terpencil.
- Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program KB.
- Tingginya angka perkawinan usia dini.
- Masih rendahnya ketahanan dan kualitas keluarga.
- Kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat.
- Data kependudukan untuk perencanaan KB belum sepenuhnya akurat dan terintegrasi.

3. Akar Masalah
   - Keterbatasan sarana prasarana pelayanan KB di tingkat desa/kelurahan.
   - Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam pengendalian penduduk.
   - Anggaran program KB dan ketahanan keluarga masih terbatas.
   - Rendahnya kapasitas dan jumlah tenaga penyuluh KB.
   - Minimnya sosialisasi tentang pentingnya pengaturan kelahiran dan ketahanan keluarga.
   - Faktor budaya, adat, dan nilai sosial yang masih menghambat penerimaan KB.
   - Sistem data dan informasi kependudukan serta keluarga belum terintegrasi.
   - Rendahnya peran serta swasta dan masyarakat dalam mendukung program KB.

   Adapun pemetaan permasalahan DP3AP2KB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.5 Pemetaan Permasalahan DP3AP2KB**

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | Pengendalian penduduk dan pelaksanaan program keluarga berencana belum optimal. | Laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi. | Keterbatasan sarana prasarana pelayanan KB di tingkat desa/kelurahan. |
| | | Angka unmet need (kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi) masih tinggi. | Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam pengendalian penduduk. |
| | | Akses dan kualitas pelayanan KB belum merata, terutama di daerah terpencil. | Anggaran program KB dan ketahanan keluarga masih terbatas. |
| | | Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program KB. | Rendahnya kapasitas dan jumlah tenaga penyuluh KB. |
| | | Tingginya angka perkawinan usia dini. | Minimnya sosialisasi tentang pentingnya pengaturan kelahiran dan ketahanan |

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | | keluarga |
| | | Masih rendahnya ketahanan dan kualitas keluarga | Faktor budaya, adat, dan nilai sosial yang masih menghambat penerimaan KB. |
| | | Kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat. | Sistem data dan informasi kependudukan serta keluarga belum terintegrasi. |
| | | Data kependudukan untuk perencanaan KB belum sepenuhnya akurat dan terintegrasi. | Rendahnya peran serta swasta dan masyarakat dalam mendukung program KB |

**b). Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode diskusi kelompok terarah yang melibatkan bidang terkait, dengan menyesuaikan enam bidang yang ada di kementerian PPPA dan tupoksinya Dinas P3AP2KB.

Berdasarkan hasil diskusi ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Anggaran Responsif Gender dalam APBD
2. Belum optimalnya pendampingan stunting ke Masyarakat.
3. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap Perempuan
4. Belum optimalnya pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana.

Adapun Teknik menyimpulkan isu strategis DP3AP2KB dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DP3AP2KB

| Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD | Permasalahan PD | Isu KLHS yang Relevan | Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD | | | Isu Strategis PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Belum optimalnya Pengendalian penduduk dan pelaksanaan program keluarga berencana | Rendahnya kapasitas dan jumlah tenaga penyuluh KB | Pertumbuhan populasi yang cepat dapat menyebabkan penipisan sumber daya alam seperti air dan pangan mengancam kelangsungan hidup manusia | Kepadatan penduduk berkontribusi pada masalah ekonomi dan kesehatan karena sumber daya dan layanan yang terbatas tidak dapat memenuhi kebutuhan semua orang | Kepadatan penduduk berkontribusi pada masalah ekonomi dan kesehatan karena sumber daya dan layanan yang terbatas tidak dapat memenuhi kebutuhan semua orang | Belum Optimalnya Anggaran Responsif Gender dalam APBD |
| | | | | | | Belum optimalnya pendampingan stunting ke Masyarakat. |
| | | | | | | Masih tingginya kasus kekerasan terhadap Perempuan |
| | | | | | | Belum optimalnya pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana |

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## 1. Tujuan Renstra DP3AP2KB Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang akan datang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataaan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu dalam jangka waktu 5 tahun adalah **Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak dan Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas.**

Tujuan dan sasaran Renstra DP3AP2KB Tahun 2025-2029 ditentukan oleh Norma, standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

## 2. Sasaran Renstra DP3AP2KB Tahun 2025-2029

Sasaran Merupakan hasil yang diharapkan terwujud pada lima tahun yang akan datang. Adapun sasaran DP3AP2KB untuk lima tahun kedepan adalah:

1. Peran serta/ Sumbangsih Perempuan dalam Pendapatan Kerja
2. Keterlibatan Perempuan di Parlemen
3. Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
4. Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender
5. Meningkatnya Pelayanan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
6. Meningkatnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan
7. Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif

   Adapun Gambaran Tujuan dan Sasaran DP3AP2KB dapat dilihat pada gambar dibawah:

### 3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DP3AP2KB Tahun 2025-2029.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Perempuan
2. Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak
3. Meningkatkan fasilitasi dan Pemenuhan hak anak
4. Meningkatkan peran serta keluarga dalam menekan angka kelahiran.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD

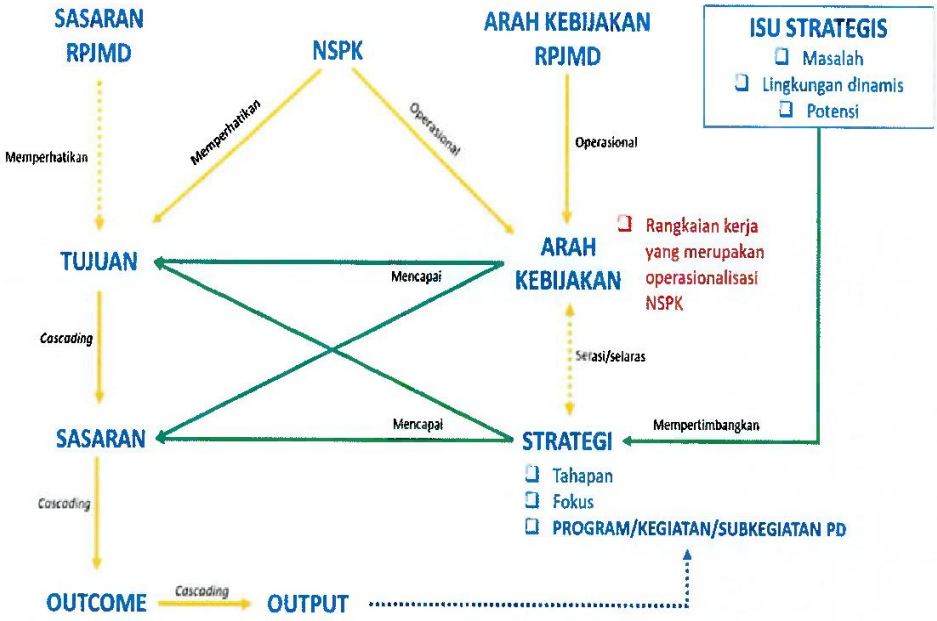


Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

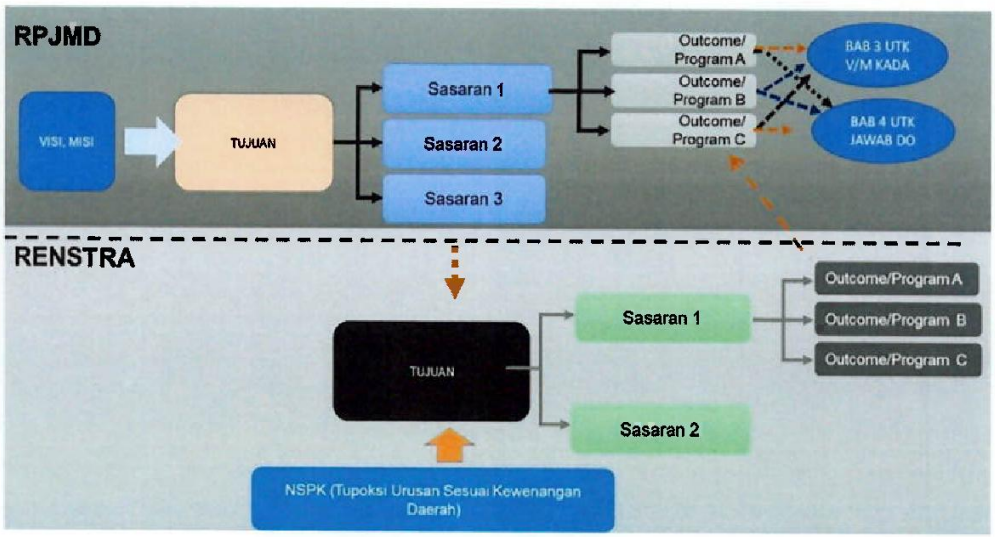

Untuk melihat tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Bengkulu dapat dilihat pada *Tabel 3.1 Berikut ini:*

## TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA DP3AP2KB KOTA BENGKULU

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| **2.08.2.14.2.13.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu** | | | | | | | | | | | |
| - Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga, Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dan Pemberdayaan Gender | Meningkatnya Kesetaraan Gender Dan perlindungan Anak, Terwujudnya Keluarga Berkualitas | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks) | 96,12 | 96,95 | 96,95 | 96,95 | 96,98 | 96,98 | 96,98 | |
| | | | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks) | NA:NA | 58:58 | 58:58 | 60:60 | 61:61 | 63:63 | 64:64 | |
| | | | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks) | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |
| | | | Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks) | NA | 65 | 65 | 67 | 69 | 70 | 71 | |
| | | Meningkatnya pelayanan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan | Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | Peran serta/ Sumbangsih Perempuan dalam Pendapatan Kerja | Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja (%) | 30 | 30 | 33 | 35 | 35 | 37 | 40 | |
| | | Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak | Persentase kecamatan layak anak (%) | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| | | Meningkatnya kepesertaan KB aktif | Persentase peserta KB aktif (%) | 78,83 | 78,9 | 78,9 | 79 | 80 | 83 | 85 | |
| | | Meningkatnya pelayanan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan | Persentase kasus korban kekerasan yang mendapatkan layanan (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | keterlibatan perempuan di parlemen | Persentase keterlibatan perempuan di parlemen (%) | 28,13 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| | | keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan | Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan (%) | 21,15 | 21,3 | 21,5 | 21,5 | 22 | 22 | 23 | |
| | | meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender | Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (Nilai) | 532.49-600 | 600-700 | 600-700 | 600-700 | 600-700 | 700-800 | 700-800 | |

Tabel 3.2 Penahapan Renstra DP3AP2KB

| TAHAP I (2026) | TAHAP II (2027) | TAHAP III (2028) | TAHAP IV (2029) | TAHAP V (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Peningkatan sarana dan Prasarana | Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia | Peningkatan kerjasama lintas sektor dan stakeholder | Peningkatan kualitas pelayanan dengan digitalisasi dan Modernisasi | Penguatan kualitas pelayanan |

**Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra DP3AP2KB**

| No. | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga, Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dan Pemberdayaan Gender | Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan | Meningkatkan peran serta perempuan dalam pemerintahan, masyarakat dan keluarga | |
| 2 | | Penurunan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan | Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan | |
| 3 | | Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak | Penurunan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan | |
| 4 | | Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak secara Komprehensif | Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak | |
| 5 | | Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak | Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak secara Komprehensif | |
| 6 | | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak | Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak | |
| 7 | | Peningkatan Pengendalian Pertambahan Jumlah Penduduk | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak | |
| 8 | | Peningkatan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Peningkatan Pengendalian Pertambahan Jumlah Penduduk | |
| 9 | | Peningkatan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) | Peningkatan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | |

## Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra DP3AP2KB

| No. | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET |
|---|---|---|---|---|
| 10 | | | Peningkatan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) | |
| 11 | | | Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan | |
| 12 | | | Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasaan pembangunan | |

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Tahun 2025 – 2029 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu

Dengan ditetapkannya strategi pencapaian tujuan dan sasaran dan tujuan melalui penetapan kebijakan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu menetapkan program dan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kota Bengkulu serta tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu. Adapu Jumlah program yang ada pada dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu yang termuat didalam Renstra saat ini adalah 12 (Dua Belas) Program, 29 (Dua Puluh Sembilan) Kegiatan dan 71 (Tujuh Puluh Satu) Sub Kegiatan.

## 4.1 Uraian Program

Dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 terdapat 12 (Dua Belas) Program, sebagaimana berikut:

1. **Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan

1. **Program Perlindungan Perempuan**

Outcome : Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan

2. **Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Outcome: Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak

2. **Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

Outcome : Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak

3. **Program Pemenuhan Hak Anak**

Output: Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif

4. **Program Perlindungan Khusus Anak**

Output : Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak

5. **Program Pengendalian Penduduk**

Output: Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk

6. **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Output : Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

7. **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

Output: Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)

8. **Program Administrasi Pemerintahan Desa**

Output : Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

9. **Program Pemeberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

Output:: Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

**10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Output: Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah

Penetapan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan gambar berikut ini:

**Gambar 4.1**

**Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD**

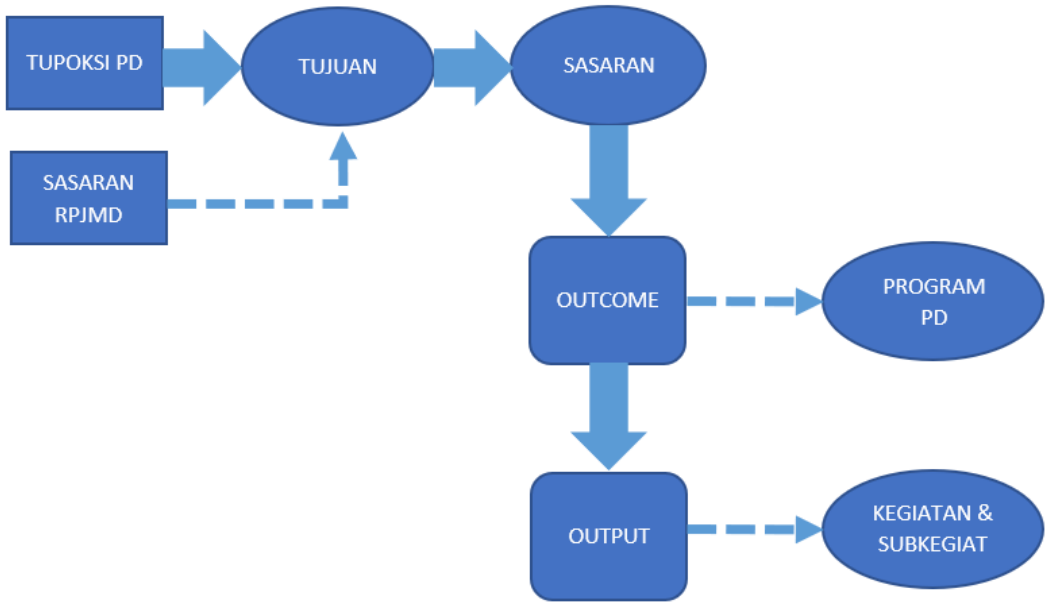

# TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BENGKULU

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | 1.240.000.000 | | 1.340.458.122 | | 1.410.000.000 | | 1.439.000.000 | | 1.504.200.158,61 | |
| 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | 480.000.000 | | 480.000.000 | | 500.000.000 | | 511.000.000 | | 521.000.000 | |
| Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase) | 19 | 20 | 21 | 480.000.000 | 22 | 480.000.000 | 22 | 500.000.000 | 23 | 511.000.000 | 24 | 521.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%) | 57,74 | 57,8 | 58 | | 58 | | 59 | | 61 | | 62 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | 290.000.000 | | 320.458.122 | | 335.000.000 | | 321.000.000 | | 335.000.000 | |
| Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) | 0 | 60 | 60 | 290.000.000 | 65 | 320.458.122 | 65 | 335.000.000 | 70 | 321.000.000 | 70 | 335.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender Pemenuhan Hak | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak | 0 | 55 | 60 | 50.000.000 | 62 | 55.000.000 | 63 | 60.000.000 | 66 | 65.000.000 | 68 | 70.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak | Anak Sesuai (Indeks) | | | | | | | | | | | | | Perlindungan Anak |
| 2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | | 70.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 80.000.000 | | 85.000.000 | |
| Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase) | 30 | 35 | 40 | 70.000.000 | 40 | 75.000.000 | 45 | 75.000.000 | 47 | 80.000.000 | 50 | 85.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | 200.000.000 | | 240.000.000 | | 260.000.000 | | 280.000.000 | | 298.200.158,61 | |
| Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks) | 0 | 65 | 67 | 200.000.000 | 69 | 240.000.000 | 71 | 260.000.000 | 73 | 280.000.000 | 75 | 298.200.158,61 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | 150.000.000 | | 170.000.000 | | 180.000.000 | | 182.000.000 | | 195.000.000 | |
| Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks) | 0 | 65 | 67 | 150.000.000 | 69 | 170.000.000 | 71 | 180.000.000 | 73 | 182.000.000 | 75 | 195.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase) | 0 | 65 | 67 | | 69 | | 71 | | 73 | | 75 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | 570.000.000 | | 580.000.000 | | 575.000.000 | | 590.000.000 | | 595.000.000 | |
| 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase) | NA | 50 | 52 | 70.000.000 | 53 | 70.000.000 | 54 | 60.000.000 | 55 | 65.000.000 | 56 | 70.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase) | NA | 50 | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | | 500.000.000 | | 510.000.000 | | 515.000.000 | | 525.000.000 | | 525.000.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase) | NA | 50 | 52 | 500.000.000 | 53 | 510.000.000 | 54 | 515.000.000 | 55 | 525.000.000 | 56 | 525.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%) | NA | 50 | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN | | | | | 8.218.363.771 | | 8.308.472.924 | | 8.448.509.667 | | 8.613.179.861 | | 8.702.612.400 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 6.515.957.919 | | 6.375.686.832 | | 6.468.509.667 | | 6.519.612.400 | | 6.532.612.400 | |
| Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah | Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%) | 100 | 100 | 100 | 6.515.957.919 | 100 | 6.375.686.832 | 100 | 6.468.509.667 | 100 | 6.519.612.400 | 100 | 6.532.612.400 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | 292.405.852 | | 347.786.092 | | 345.000.000 | | 373.567.461 | | 385.000.000 | |
| Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita) | 2,16 | 2,16 | 2,14 | 292.405.852 | 2,08 | 347.786.092 | 2,05 | 345.000.000 | 2,02 | 373.567.461 | 2 | 385.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun) | 14.3-14.3 | 14.3-14.3 | 14-14 | | 13.9-13.9 | | 13.7-13.7 | | 13.5-13.5 | | 13.2-13.2 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | 900.000.000 | | 1.010.000.000 | | 1.055.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.150.000.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase) | 64,05 | 64,05 | 65 | 900.000.000 | 65,5 | 1.010.000.000 | 67 | 1.055.000.000 | 68 | 1.100.000.000 | 69 | 1.150.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%) | 9,72 | 9,5 | 8 | | 7,9 | | 7,6 | | 7,4 | | 7,3 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | | | | | | | | | | | | | | Keluarga Berencana |
| 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | 510.000.000 | | 575.000.000 | | 580.000.000 | | 620.000.000 | | 635.000.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) | Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase) | 67 | 67 | 69 | 510.000.000 | 69 | 575.000.000 | 70 | 580.000.000 | 73 | 620.000.000 | 75 | 635.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 10028363771.00 | | 10228931046.00 | | 10433509667.00 | | 10642179861.00 | | 10801812558.61 | |

## 4.2 Uraian Kegiatan

Dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 terdapat 29 (Dua Puluh Sembilan) Kegiatan dan dapat dilihat pada table 4.2:

### TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA DP3AP2KB PEMERINTAH KOTA BENGKULU

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **2.08.2.14.2.13.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu** | | | | | | | |
| - Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga, Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dan Pemberdayaan Gender | Meningkatnya Kesetaraan Gender Dan perlindungan Anak, Terwujudnya Keluarga Berkualitas | | | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks) | | |
| | | | | | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks) | | |
| | | | | | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ((%) Indeks) | | |
| | | | | | Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya kepesertaan KB aktif | | | Persentase peserta KB aktif (%) | | |
| | | | Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk | | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita) | 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun) | 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | |
| | | | | Terlaksananya Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Dengan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | |
| | | | | | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan) | 2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | |
| | | | | | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan) | 2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | |
| | | | | | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan) | 2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana | |
| | | | | | Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan) | 2.14.02.2.01.0028 - Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | |
| | | | | Terlaksananya Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kab/kota | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen) | 2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan) | 2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan) | 2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan) | 2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen) | 2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan) | 2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana | |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase) | 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | |
| | | | | | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%) | 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | |
| | | | | Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Loka | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen) | 2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | |
| | | | | | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen) | 2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan) | 2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan) | 2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan) | 2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | |
| | | | | | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan) | 2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen) | 2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | |
| | | | | | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen) | 2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang) | 2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan) | 2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | |
| | | | | | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang) | 2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan) | 2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | |
| | | | | Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang) | 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan) | 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | | Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) | 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) | 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang) | 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang) | 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang) | 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit) | 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | | Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) | 2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang) | 2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | |
| | | | | | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan) | 2.14.03.2.03.0004 - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | |
| | | | | | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit) | 2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) | 2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | |
| | | | | | Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang) | 2.14.03.2.03.0013 - Peningkatan Kesertaan KB Pria | |
| | | | | | Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang) | 2.14.03.2.03.0015 - Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang) | 2.14.03.2.03.0016 - Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan | |
| | | | | Terlasananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen) | 2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | |
| | | | | | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung) | 2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | |
| | | | | | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung) | 2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen) | 2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) | | Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase) | 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | |
| | | | | Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang) | 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok) | 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan) | 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan) | 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang) | 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | |
| | | | | | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit) | 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan) | 2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | |
| | | | | | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit) | 2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang) | 2.14.04.2.01.0020 - Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan) | 2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | |
| | | | | | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang) | 2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok) | 2.14.04.2.01.0026 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | |
| | | | | Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan) | 2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan) | 2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | |
| | | | | | Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan) | 2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan) | 2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | |
| | | | | | Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan) | 2.14.04.2.02.0007 - Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan) | 2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga | |
| | | Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak | | | Persentase kecamatan layak anak (%) | | |
| | | | Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak | | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase) | 2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | |
| | | | | Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) | 2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) | 2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota | |
| | | | Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif | | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks) | 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak | | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks) | 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | |
| | | | | | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase) | 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Terlaksananya Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para lingkup daerah Kab/Kota | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen) | 2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen) | 2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | |
| | | | | Terlaksananya Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daearh Kab/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | |
| | | | | Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) | 2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) | 2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai | |
| | | Meningkatnya pelayanan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan | | | Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan (%) | | |
| | | | | | Persentase kasus korban kekerasan yang mendapatkan layanan (%) | | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan | | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) | 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | |
| | | | | Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga) | 2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga) | 2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | terlaksananya layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang) | 2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang) | 2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) | 2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) | 2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | Peran serta/ Sumbangsih Perempuan dalam Pendapatan Kerja | | | Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja (%) | | |
| | | | Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan | | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase) | 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | |
| | | | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%) | 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan) | 2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan) | 2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga) | 2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang) | 2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga) | 2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | |
| | | | | | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang) | 2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) | 2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) | 2.08.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender Pemenuhan Hak Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak | | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks) | 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | |
| | | | | Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase) | 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase) | 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen) | 2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen) | 2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase) | 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | |
| | | | | | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%) | 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen) | 2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen) | 2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) | 2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen) | 2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) | 2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen) | 2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | |
| | | keterlibatan perempuan di parlemen | | | Persentase keterlibatan perempuan di parlemen (%) | | |
| | | | Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan | | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase) | 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | |
| | | | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%) | 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | |
| | | | | Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan) | 2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan) | 2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga) | 2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang) | 2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga) | 2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | |
| | | | | | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang) | 2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) | 2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) | 2.08.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender Pemenuhan Hak Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak | | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks) | 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | |
| | | | | Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase) | 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase) | 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen) | 2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen) | 2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase) | 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | |
| | | | | | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%) | 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | |
| | | | | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen) | 2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen) | 2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) | 2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen) | 2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) | 2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen) | 2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | |
| | | keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan | | | Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan (%) | | |
| | | | Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan | | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase) | 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%) | 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | |
| | | | | Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan) | 2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan) | 2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga) | 2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang) | 2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga) | 2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | |
| | | | | | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang) | 2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) | 2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) | 2.08.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender Pemenuhan Hak Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak | | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks) | 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | |
| | | | | Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase) | 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase) | 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen) | 2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen) | 2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase) | 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | |
| | | | | | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%) | 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen) | 2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen) | 2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) | 2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen) | 2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) | 2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen) | 2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | |
| | | meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender | Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan | | Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (Nilai) | | |
| | | | | | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase) | 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | |
| | | | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%) | 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | |
| | | | | Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan) | 2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan) | 2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga) | 2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang) | 2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga) | 2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | |
| | | | | | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang) | 2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) | 2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | | jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) | 2.08.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender Pemenuhan Hak Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak | | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks) | 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | |
| | | | | Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. | |

## 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Sub kegiatan merupakan rincian dari kegiatan yang berisi jenis belanja dan tindakan yang lebih detail untuk mencapai keluaran yang ditetapkan dalam kegaiatan. Untuk lebih rincinya sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

# TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | 1.240.000.000 | | 1.340.458.122 | | 1.410.000.000 | | 1.439.000.000 | | 1.504.200.158,61 | | |
| 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | 480.000.000 | | 480.000.000 | | 500.000.000 | | 511.000.000 | | 521.000.000 | | |
| Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase) | 19 | 21 | 480.000.000 | 22 | 480.000.000 | 22 | 500.000.000 | 23 | 511.000.000 | 24 | 521.000.000 | 2.08.2.14.2.13.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu | |
| | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%) | 57,74 | 58 | | 58 | | 59 | | 61 | | 62 | | | |
| 2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 130.000.000 | | 140.000.000 | | 145.000.000 | | |
| Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan) | 1 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 145.000.000 | | |
| | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah | 0 | 35 | | 35 | | 35 | | 40 | | 42 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | dan non pemerintah) (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | 75.000.000 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan) | 1 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 75.000.000 | | |
| 2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 0 | 35 | 60.000.000 | 35 | 60.000.000 | 35 | 65.000.000 | 40 | 70.000.000 | 42 | 70.000.000 | | |
| 2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 61.000.000 | | 61.000.000 | | |
| Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang) | 0 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 61.000.000 | 1 | 61.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga) | 0 | 35 | | 35 | | 35 | | 40 | | 42 | | | |
| 2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 31.000.000 | | 30.000.000 | | |
| Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga) | 0 | 35 | 30.000.000 | 35 | 30.000.000 | 35 | 30.000.000 | 40 | 31.000.000 | 42 | 30.000.000 | | |
| 2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 31.000.000 | | |
| Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang) | 0 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 31.000.000 | | |
| 2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 310.000.000 | | 310.000.000 | | 315.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) | 0 | 60 | 300.000.000 | 60 | 300.000.000 | 60 | 310.000.000 | 60 | 310.000.000 | 60 | 315.000.000 | | |
| 2.08.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 310.000.000 | | 310.000.000 | | 315.000.000 | | |
| terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi | jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) | 0 | 60 | 300.000.000 | 60 | 300.000.000 | 60 | 310.000.000 | 60 | 310.000.000 | 60 | 315.000.000 | | |
| 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | 290.000.000 | | 320.458.122 | | 335.000.000 | | 321.000.000 | | 335.000.000 | | |
| Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) | 0 | 60 | 290.000.000 | 65 | 320.458.122 | 65 | 335.000.000 | 70 | 321.000.000 | 70 | 335.000.000 | 2.08.2.14.2.13.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu | |
| 2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | 140.000.000 | | 145.458.122 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 155.000.000 | | |
| Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0 | 4 | 140.000.000 | 6 | 145.458.122 | 7 | 150.000.000 | 8 | 150.000.000 | 8 | 155.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga) | 40 | 40 | | 40 | | 45 | | 45 | | 45 | | | |
| 2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 80.000.000 | | |
| Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0 | 4 | 70.000.000 | 6 | 70.000.000 | 7 | 75.000.000 | 8 | 75.000.000 | 8 | 80.000.000 | | |
| 2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 70.000.000 | | 75.458.122 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga) | 40 | 40 | 70.000.000 | 40 | 75.458.122 | 45 | 75.000.000 | 45 | 75.000.000 | 45 | 75.000.000 | | |
| 2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 51.000.000 | | 55.000.000 | | |
| terlaksananya layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat | 10 | 15 | 50.000.000 | 17 | 50.000.000 | 17 | 55.000.000 | 18 | 51.000.000 | 19 | 55.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Kabupaten/Kota (orang) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 51.000.000 | | 55.000.000 | | |
| Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang) | 10 | 15 | 50.000.000 | 17 | 50.000.000 | 17 | 55.000.000 | 18 | 51.000.000 | 19 | 55.000.000 | | |
| 2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100.000.000 | | 125.000.000 | | 130.000.000 | | 120.000.000 | | 125.000.000 | | |
| Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 0 | 12 | 100.000.000 | 12 | 125.000.000 | 15 | 130.000.000 | 17 | 120.000.000 | 18 | 125.000.000 | | |
| | jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) | 0 | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | | |
| 2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 0 | 12 | 50.000.000 | 12 | 70.000.000 | 15 | 70.000.000 | 17 | 60.000.000 | 18 | 65.000.000 | | |
| 2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) | 0 | 60 | 50.000.000 | 60 | 55.000.000 | 60 | 60.000.000 | 60 | 60.000.000 | 60 | 60.000.000 | | |
| 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | |
| Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender Pemenuhan Hak Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks) | 0 | 60 | 50.000.000 | 62 | 55.000.000 | 63 | 60.000.000 | 66 | 65.000.000 | 68 | 70.000.000 | 2.08.2.14.2.13.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu | |
| 2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | |
| Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 70.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. | | | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | |
| Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 70.000.000 | | |
| 2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | 70.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 80.000.000 | | 85.000.000 | | |
| Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase) | 30 | 40 | 70.000.000 | 40 | 75.000.000 | 45 | 75.000.000 | 47 | 80.000.000 | 50 | 85.000.000 | 2.08.2.14.2.13.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu | |
| 2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di | | | | 70.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 80.000.000 | | 85.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) | 6 | 9 | 70.000.000 | 11 | 75.000.000 | 11 | 75.000.000 | 12 | 80.000.000 | 12 | 85.000.000 | | |
| 2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota | | | | 70.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 80.000.000 | | 85.000.000 | | |
| Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) | 6 | 9 | 70.000.000 | 11 | 75.000.000 | 11 | 75.000.000 | 12 | 80.000.000 | 12 | 85.000.000 | | |
| 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | 200.000.000 | | 240.000.000 | | 260.000.000 | | 280.000.000 | | 298.200.158,61 | | |
| Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks) | 0 | 67 | 200.000.000 | 69 | 240.000.000 | 71 | 260.000.000 | 73 | 280.000.000 | 75 | 298.200.158,61 | 2.08.2.14.2.13.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu | |
| 2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 100.000.000 | | 120.000.000 | | 130.000.000 | | 140.000.000 | | 150.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 45 | 45 | 100.000.000 | 45 | 120.000.000 | 45 | 130.000.000 | 45 | 140.000.000 | 45 | 150.000.000 | | |
| | jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 0 | 45 | | 45 | | 45 | | 45 | | 45 | | | |
| 2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | 75.000.000 | | |
| Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan | 45 | 45 | 50.000.000 | 45 | 60.000.000 | 45 | 65.000.000 | 45 | 70.000.000 | 45 | 75.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Kabupaten/Kota (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | 75.000.000 | | |
| Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 0 | 45 | 50.000.000 | 45 | 60.000.000 | 45 | 65.000.000 | 45 | 70.000.000 | 45 | 75.000.000 | | |
| 2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 100.000.000 | | 120.000.000 | | 130.000.000 | | 140.000.000 | | 148.200.158,61 | | |
| Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 0 | 1 | 100.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 148.200.158,61 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 0 | 45 | | 45 | | 45 | | 45 | | 45 | | | |
| 2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | 75.000.000 | | |
| Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 0 | 45 | 50.000.000 | 45 | 60.000.000 | 45 | 65.000.000 | 45 | 70.000.000 | 45 | 75.000.000 | | |
| 2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | 73.200.158,61 | | |
| Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 73.200.158,61 | | |
| 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | 150.000.000 | | 170.000.000 | | 180.000.000 | | 182.000.000 | | 195.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase) | 0 | 67 | 150.000.000 | 69 | 170.000.000 | 71 | 180.000.000 | 73 | 182.000.000 | 75 | 195.000.000 | 2.08.2.14.2.13.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu | |
| | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks) | 0 | 67 | | 69 | | 71 | | 73 | | 75 | | | |
| 2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 56.000.000 | | 60.000.000 | | |
| Terlaksananya Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para lingkup daerah Kab/Kota | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen) | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 56.000.000 | 1 | 60.000.000 | | |
| 2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | | | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 56.000.000 | | 60.000.000 | | |
| terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen) | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 56.000.000 | 1 | 60.000.000 | | |
| 2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 60.000.000 | | 61.000.000 | | 65.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daearh Kab/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 40 | 40 | 50.000.000 | 40 | 55.000.000 | 40 | 60.000.000 | 40 | 61.000.000 | 40 | 65.000.000 | | |
| 2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 60.000.000 | | 61.000.000 | | 65.000.000 | | |
| Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 40 | 40 | 50.000.000 | 40 | 55.000.000 | 40 | 60.000.000 | 40 | 61.000.000 | 40 | 65.000.000 | | |
| 2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | |
| Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) | 40 | 40 | 50.000.000 | 40 | 60.000.000 | 40 | 65.000.000 | 40 | 65.000.000 | 40 | 70.000.000 | | |
| 2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai | | | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | |
| terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang | 40 | 40 | 50.000.000 | 40 | 60.000.000 | 40 | 65.000.000 | 40 | 65.000.000 | 40 | 70.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | mendapatkan bimtek (Orang) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | 570.000.000 | | 580.000.000 | | 575.000.000 | | 590.000.000 | | 595.000.000 | | |
| 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | |
| Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase) | NA | 52 | 70.000.000 | 53 | 70.000.000 | 54 | 60.000.000 | 55 | 65.000.000 | 56 | 70.000.000 | 2.08.2.14.2.13.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu | |
| | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase) | NA | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | | |
| 2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | |
| Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen) | 1 | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 70.000.000 | | |
| 2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen) | 1 | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 70.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | 500.000.000 | | 510.000.000 | | 515.000.000 | | 525.000.000 | | 525.000.000 | | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase) | NA | 52 | 500.000.000 | 53 | 510.000.000 | 54 | 515.000.000 | 55 | 525.000.000 | 56 | 525.000.000 | 2.08.2.14.2.13.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu | |
| | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%) | NA | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | | |
| 2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 500.000.000 | | 510.000.000 | | 515.000.000 | | 525.000.000 | | 525.000.000 | | |
| Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen) | 4 | 4 | 500.000.000 | 4 | 510.000.000 | 4 | 515.000.000 | 4 | 525.000.000 | 4 | 525.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |
| Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen) | 4 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 110.000.000 | 4 | 110.000.000 | | |
| 2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) | 1 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | | |
| 2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | 300.000.000 | | 310.000.000 | | 315.000.000 | | 315.000.000 | | 315.000.000 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen) | 4 | 4 | 300.000.000 | 4 | 310.000.000 | 4 | 315.000.000 | 4 | 315.000.000 | 4 | 315.000.000 | | |
| 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | 8.218.363.771 | | 8.308.472.924 | | 8.448.509.667 | | 8.613.179.861 | | 8.702.612.400 | | |
| 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 6.515.957.919 | | 6.375.686.832 | | 6.468.509.667 | | 6.519.612.400 | | 6.532.612.400 | | |
| Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah | Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%) | 100 | 100 | 6.515.957.919 | 100 | 6.375.686.832 | 100 | 6.468.509.667 | 100 | 6.519.612.400 | 100 | 6.532.612.400 | 2.08.2.14.2.13.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu | |
| 2.14.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 140.000.000 | | 130.000.000 | | 150.000.000 | | 145.000.000 | | 155.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7 | 7 | 140.000.000 | 7 | 130.000.000 | 7 | 150.000.000 | 7 | 145.000.000 | 7 | 155.000.000 | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| 2.14.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 80.000.000 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | 10 | 70.000.000 | 10 | 70.000.000 | 10 | 75.000.000 | 10 | 75.000.000 | 10 | 80.000.000 | | |
| 2.14.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 70.000.000 | | 60.000.000 | | 75.000.000 | | 70.000.000 | | 75.000.000 | | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7 | 7 | 70.000.000 | 7 | 60.000.000 | 7 | 75.000.000 | 7 | 70.000.000 | 7 | 75.000.000 | | |
| 2.14.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 4.880.634.400 | | 4.782.686.832 | | 4.813.254.214 | | 4.889.412.400 | | 4.850.412.400 | | |
| Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 50 | 50 | 4.880.634.400 | 55 | 4.782.686.832 | 60 | 4.813.254.214 | 63 | 4.889.412.400 | 60 | 4.850.412.400 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 0 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 2.14.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 4.445.222.000 | | 4.347.686.832 | | 4.357.841.814 | | 4.434.000.000 | | 4.395.000.000 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 50 | 50 | 4.445.222.000 | 55 | 4.347.686.832 | 60 | 4.357.841.814 | 63 | 4.434.000.000 | 60 | 4.395.000.000 | | |
| 2.14.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 385.412.400 | | 380.000.000 | | 395.412.400 | | 395.412.400 | | 395.412.400 | | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | 12 | 385.412.400 | 12 | 380.000.000 | 12 | 395.412.400 | 12 | 395.412.400 | 12 | 395.412.400 | | |
| 2.14.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 0 | 12 | 50.000.000 | 12 | 55.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | | |
| 2.14.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 132.000.000 | | 135.000.000 | | 148.200.000 | | 150.200.000 | | 150.200.000 | | |
| Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 4 | 4 | 132.000.000 | 4 | 135.000.000 | 4 | 148.200.000 | 4 | 150.200.000 | 4 | 150.200.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 50 | 50 | | 55 | | 60 | | 63 | | 63 | | | |
| 2.14.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | 72.000.000 | | 75.000.000 | | 83.200.000 | | 85.200.000 | | 85.200.000 | | |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 50 | 50 | 72.000.000 | 55 | 75.000.000 | 60 | 83.200.000 | 63 | 85.200.000 | 63 | 85.200.000 | | |
| 2.14.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | |
| Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 4 | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 65.000.000 | 4 | 65.000.000 | 4 | 65.000.000 | | |
| 2.14.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 510.000.000 | | 485.000.000 | | 493.731.934 | | 479.000.000 | | 510.000.000 | | |
| Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 510.000.000 | 12 | 485.000.000 | 12 | 493.731.934 | 12 | 479.000.000 | 12 | 510.000.000 | | |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 2.14.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 30.000.000 | | 25.000.000 | | 28.731.934 | | 29.000.000 | | 30.000.000 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 30.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 28.731.934 | 12 | 29.000.000 | 12 | 30.000.000 | | |
| 2.14.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 115.000.000 | | 115.000.000 | | 120.000.000 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 110.000.000 | 12 | 110.000.000 | 12 | 115.000.000 | 12 | 115.000.000 | 12 | 120.000.000 | | |
| 2.14.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 85.000.000 | 12 | 85.000.000 | | |
| 2.14.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | | |
| 2.14.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 220.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 225.000.000 | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 12 | 220.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 225.000.000 | | |
| 2.14.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 556.471.087 | | 556.000.000 | | 556.471.087 | | 561.000.000 | | 572.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 556.471.087 | 12 | 556.000.000 | 12 | 556.471.087 | 12 | 561.000.000 | 12 | 572.000.000 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 2.14.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | | |
| 2.14.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 284.000.000 | | 284.000.000 | | 284.000.000 | | 284.000.000 | | 285.000.000 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 284.000.000 | 12 | 284.000.000 | 12 | 284.000.000 | 12 | 284.000.000 | 12 | 285.000.000 | | |
| 2.14.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 70.471.087 | | 70.000.000 | | 70.471.087 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 70.471.087 | 12 | 70.000.000 | 12 | 70.471.087 | 12 | 75.000.000 | 12 | 75.000.000 | | |
| 2.14.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 210.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 210.000.000 | | |
| 2.14.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 296.852.432 | | 287.000.000 | | 306.852.432 | | 295.000.000 | | 295.000.000 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | 2 | 296.852.432 | 2 | 287.000.000 | 2 | 306.852.432 | 2 | 295.000.000 | 2 | 295.000.000 | | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| 2.14.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 100.000.000 | | 90.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 100 | 100 | 100.000.000 | 100 | 90.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | | |
| 2.14.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 96.852.432 | | 97.000.000 | | 106.852.432 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5 | 5 | 96.852.432 | 5 | 97.000.000 | 5 | 106.852.432 | 5 | 105.000.000 | 5 | 105.000.000 | | |
| 2.14.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 90.000.000 | 2 | 90.000.000 | | |
| 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | 292.405.852 | | 347.786.092 | | 345.000.000 | | 373.567.461 | | 385.000.000 | | |
| Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita) | 2,16 | 2,14 | 292.405.852 | 2,08 | 347.786.092 | 2,05 | 345.000.000 | 2,02 | 373.567.461 | 2 | 385.000.000 | 2.08.2.14.2.13.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu | |
| | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun) | 14.3-14.3 | 14-14 | | 13.9-13.9 | | 13.7-13.7 | | 13.5-13.5 | | 13.2-13.2 | | | |
| 2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | | 150.000.000 | | 177.786.092 | | 175.000.000 | | 190.000.000 | | 195.000.000 | | |
| Terlaksananya Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Dengan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota Dalam | Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0 | 1 | 150.000.000 | 1 | 177.786.092 | 1 | 175.000.000 | 1 | 190.000.000 | 1 | 195.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana | | | | 50.000.000 | | 67.786.092 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan) | 12 | 12 | 50.000.000 | 12 | 67.786.092 | 12 | 65.000.000 | 12 | 70.000.000 | 12 | 70.000.000 | | |
| 2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 60.000.000 | | |
| Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 60.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 2.14.02.2.01.0028 - Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | | | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | |
| Terlaksananya Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan) | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 65.000.000 | | |
| 2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 142.405.852 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | 183.567.461 | | 190.000.000 | | |
| Terlaksananya Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kab/kota | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan) | 4 | 4 | 142.405.852 | 4 | 170.000.000 | 4 | 170.000.000 | 4 | 183.567.461 | 4 | 190.000.000 | | |
| | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | | | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan) | 4 | 4 | 50.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 65.000.000 | 4 | 70.000.000 | | |
| 2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 63.567.461 | | 65.000.000 | | |
| Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen) | 12 | 12 | 50.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 63.567.461 | 12 | 65.000.000 | | |
| 2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana | | | | 42.405.852 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | |
| Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | 900.000.000 | | 1.010.000.000 | | 1.055.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.150.000.000 | | |
| Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase) | 64,05 | 65 | 900.000.000 | 65,5 | 1.010.000.000 | 67 | 1.055.000.000 | 68 | 1.100.000.000 | 69 | 1.150.000.000 | 2.08.2.14.2.13.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu | |
| | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%) | 9,72 | 8 | | 7,9 | | 7,6 | | 7,4 | | 7,3 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | 250.000.000 | | 285.000.000 | | 290.000.000 | | 305.000.000 | | 320.000.000 | | |
| Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Loka | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen) | 12 | 12 | 250.000.000 | 12 | 285.000.000 | 12 | 290.000.000 | 12 | 305.000.000 | 12 | 320.000.000 | | |
| | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | | | | 100.000.000 | | 105.000.000 | | 100.000.000 | | 110.000.000 | | 115.000.000 | | |
| Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan) | 1 | 1 | 100.000.000 | 1 | 105.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 115.000.000 | | |
| 2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | | 50.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | |
| Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa | 4 | 4 | 50.000.000 | 4 | 65.000.000 | 4 | 65.000.000 | 4 | 65.000.000 | 4 | 70.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | |
| Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen) | 12 | 12 | 50.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 65.000.000 | 12 | 65.000.000 | 12 | 70.000.000 | | |
| 2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | |
| Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen) | 4 | 4 | 50.000.000 | 4 | 55.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 65.000.000 | 4 | 65.000.000 | | |
| 2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas | | | | 100.000.000 | | 120.000.000 | | 130.000.000 | | 135.000.000 | | 145.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Lapangan KB (PKB/PLKB) | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang) | 1.500 | 1.500 | 100.000.000 | 1.500 | 120.000.000 | 1.500 | 130.000.000 | 1.500 | 135.000.000 | 1.500 | 145.000.000 | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | 75.000.000 | | |
| Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang) | 1.500 | 1.500 | 50.000.000 | 1.500 | 60.000.000 | 1.500 | 65.000.000 | 1.500 | 70.000.000 | 1.500 | 75.000.000 | | |
| 2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | | | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan) | 4 | 4 | 50.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 65.000.000 | 4 | 65.000.000 | 4 | 70.000.000 | | |
| 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | | | | 450.000.000 | | 485.000.000 | | 510.000.000 | | 530.000.000 | | 555.000.000 | | |
| Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) | 4 | 4 | 450.000.000 | 4 | 485.000.000 | 4 | 510.000.000 | 4 | 530.000.000 | 4 | 555.000.000 | | |
| | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit) | 0 | 51 | | 51 | | 51 | | 51 | | 51 | | | |
| | Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang) | 0 | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang) | 0 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang) | 60 | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | | |
| | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan) | 0 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| | Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang) | 0 | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| 2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) | 12 | 12 | 50.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 65.000.000 | 12 | 70.000.000 | 12 | 70.000.000 | | |
| 2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode | | | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang) | 60 | 60 | 50.000.000 | 60 | 60.000.000 | 60 | 65.000.000 | 60 | 65.000.000 | 60 | 65.000.000 | | |
| 2.14.03.2.03.0004 - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | | | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | |
| Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan) | 0 | 3 | 50.000.000 | 3 | 55.000.000 | 3 | 60.000.000 | 3 | 65.000.000 | 3 | 70.000.000 | | |
| 2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | | 100.000.000 | | 105.000.000 | | 110.000.000 | | 120.000.000 | | 125.000.000 | | |
| Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit) | 0 | 51 | 100.000.000 | 51 | 105.000.000 | 51 | 110.000.000 | 51 | 120.000.000 | 51 | 125.000.000 | | |
| 2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | |
| Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) | 4 | 4 | 50.000.000 | 4 | 55.000.000 | 4 | 55.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 65.000.000 | | |
| 2.14.03.2.03.0013 - Peningkatan Kesertaan KB Pria | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | |
| Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria | Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang) | 0 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 55.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 2.14.03.2.03.0015 - Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang) | 0 | 30 | 50.000.000 | 30 | 50.000.000 | 30 | 50.000.000 | 30 | 50.000.000 | 30 | 50.000.000 | | |
| 2.14.03.2.03.0016 - Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | |
| Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan | Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang) | 0 | 90 | 50.000.000 | 90 | 50.000.000 | 90 | 55.000.000 | 90 | 50.000.000 | 90 | 55.000.000 | | |
| 2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | | 100.000.000 | | 120.000.000 | | 125.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | |
| Terlasananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen) | 4 | 4 | 100.000.000 | 4 | 120.000.000 | 4 | 125.000.000 | 4 | 130.000.000 | 4 | 130.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung) | 9 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| 2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | |
| Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung) | 9 | 10 | 50.000.000 | 10 | 55.000.000 | 10 | 60.000.000 | 10 | 65.000.000 | 10 | 65.000.000 | | |
| 2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | | | | 50.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | |
| Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen) | 4 | 4 | 50.000.000 | 4 | 65.000.000 | 4 | 65.000.000 | 4 | 65.000.000 | 4 | 65.000.000 | | |
| 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | 510.000.000 | | 575.000.000 | | 580.000.000 | | 620.000.000 | | 635.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) | Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase) | 67 | 69 | 510.000.000 | 69 | 575.000.000 | 70 | 580.000.000 | 73 | 620.000.000 | 75 | 635.000.000 | 2.08.2.14.2.13.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu | |
| 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | 300.000.000 | | 320.000.000 | | 320.000.000 | | 350.000.000 | | 355.000.000 | | |
| Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan) | 0 | 100 | 300.000.000 | 100 | 320.000.000 | 100 | 320.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 355.000.000 | | |
| | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok) | 80 | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | | |
| | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya | 160 | 160 | | 160 | | 160 | | 160 | | 160 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | operasional kegiatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan) | 0 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang) | 0 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit) | 0 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| 2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan) | 0 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 55.000.000 | 12 | 55.000.000 | | |
| 2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | |
| Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit) | 0 | 10 | 50.000.000 | 10 | 60.000.000 | 10 | 60.000.000 | 10 | 65.000.000 | 10 | 65.000.000 | | |
| 2.14.04.2.01.0020 - Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | |
| Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang) | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 55.000.000 | 100 | 55.000.000 | | |
| 2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan | | | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan) | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 65.000.000 | 100 | 65.000.000 | | |
| 2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | |
| Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang) | 160 | 160 | 50.000.000 | 160 | 50.000.000 | 160 | 50.000.000 | 160 | 55.000.000 | 160 | 55.000.000 | | |
| 2.14.04.2.01.0026 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 60.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok) | 80 | 80 | 50.000.000 | 80 | 50.000.000 | 80 | 50.000.000 | 80 | 55.000.000 | 80 | 60.000.000 | | |
| 2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | 210.000.000 | | 255.000.000 | | 260.000.000 | | 270.000.000 | | 280.000.000 | | |
| Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan) | 0 | 1 | 210.000.000 | 1 | 255.000.000 | 1 | 260.000.000 | 1 | 270.000.000 | 1 | 280.000.000 | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | | 110.000.000 | | 135.000.000 | | 140.000.000 | | 145.000.000 | | 150.000.000 | | |
| Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan) | 0 | 1 | 110.000.000 | 1 | 135.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 145.000.000 | 1 | 150.000.000 | | |
| 2.14.04.2.02.0007 - Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga | | | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | |
| Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga | Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan) | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 65.000.000 | | |
| 2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga | | | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan) | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 65.000.000 | | |

# TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
# RANCANGAN AKHIR
# PEMERINTAH KOTA BENGKULU

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| **2.08.2.14.2.13.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu** | | | | | | | | | | |
| **I** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Indeks | NA:NA | 58:58 | 58:58 | 60:60 | 61:61 | 63:63 | 64:64 | |
| 2 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |
| **II** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | | | | | | | |
| 1 | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) | Persentase | 64,05 | 64,05 | 65 | 65,5 | 67 | 68 | 69 | |
| 2 | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Persentase | NA | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
| 3 | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun | Rata-rata Anak per Wanita | 2,16 | 2,16 | 2,14 | 2,08 | 2,05 | 2,02 | 2 | |
| 4 | Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga | Persentase | 67 | 67 | 69 | 69 | 70 | 73 | 75 | |
| 5 | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | Indeks | 0 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | |
| 6 | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | Persentase | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | |
| 7 | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | % | 0 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | |
| 8 | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai | Indeks | 0 | 55 | 60 | 62 | 63 | 66 | 68 | |
| 9 | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan | Persentase | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 47 | 50 | |
| 10 | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | Indeks | 0 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | |
| 11 | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Persentase | 0 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | |
| 12 | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat | Persentase | NA | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
| 13 | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa | Persentase | NA | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
| 14 | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) | Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun | 14.3-14.3 | 14.3-14.3 | 14-14 | 13.9-13.9 | 13.7-13.7 | 13.5-13.5 | 13.2-13.2 | |
| 15 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | % | 9,72 | 9,5 | 8 | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | |
| 16 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan | % | 57,74 | 57,8 | 58 | 58 | 59 | 61 | 62 | |
| 17 | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) | % | NA | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |

## 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel 4.4

Program Prioritas merupakan program-program utama yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan minimal.

Tujuan utama pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kondisi yang berkelanjutan. Ini mencakup berbagai aspek seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan pembangunan, dan pelestarian lingkungan.

Dengan mendukung program prioritas pembangunan daerah berarti memberikan kontribusi aktif, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini mencakup upaya-upaya dalam berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Sub-kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat diuraikan dengan berbagai cara, tergantung pada program prioritas dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Umumnya, sub-kegiatan dirancang untuk mempercepat pencapaian target program dan memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat, disajikan pada Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah berikut ini:

TABEL 4.4 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **2.08.2.14.2.13.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu** | | | | |
| 1. | 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan | 2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | |
| | | | 2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.08.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi | |
| 2. | 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan | 2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| 3. | 2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak | 2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota | |
| 4. | 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif | 2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| 5. | 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak | 2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | |
| | | | 2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | |
| 6. | 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | |
| | | | 2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | |
| 7. | 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk | 2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | |
| | | | 2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | |
| 8. | 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | |
| | | | 2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | |
| | | | 2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | |
| | | | 2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | |
| | | | 2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | |
| | | | 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| | | | 2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | |
| | | | 2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | |
| | | | 2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | |
| | | | 2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | |
| 9. | 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) | 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | |
| | | | 2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | |
| | | | 2.14.04.2.01.0020 - Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | |
| | | | 2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | |
| | | | 2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | |

## 4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RESNTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BENGKULU TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DP3AP2KB KOTA BENGKULU

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu (DP3AP2KB) dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra DP3AP2KB yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan, dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaksanaan program.

Peran IKU dalam Pencapaian Tujuan adalah menjadi alat ukur untuk memantau dan mengevaluasi kinerja program dan kegiatan. Data dan informasi yang diperoleh dari IKU digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan dalam pelaksanaan program yang akan menjadi dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan di masa depan, yang tersaji pada **Tabel 4.5 Indikator Kinirja utama PD** berikut ini:

# TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
# RANCANGAN AKHIR RENSTRA DP3AP2KB
# PEMERINTAH KOTA BENGKULU

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| 1. | 2.08.2.14.2.13.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu | | | | | | | | | |
| 2. | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 96,12 | 96,95 | 96,95 | 96,95 | 96,98 | 96,98 | 96,98 | |
| 3. | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Indeks | NA:NA | 58:58 | 58:58 | 60:60 | 61:61 | 63:63 | 64:64 | |
| 4. | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |
| 5. | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks | NA | 65 | 65 | 67 | 69 | 70 | 71 | |
| 6. | Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah | Nilai | 532.49-600 | 600-700 | 600-700 | 600-700 | 600-700 | 700-800 | 700-800 | |
| 7. | Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 8. | Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja | % | 30 | 30 | 33 | 35 | 35 | 37 | 40 | |
| 9. | Persentase peserta KB aktif | % | 78,83 | 78,9 | 78,9 | 79 | 80 | 83 | 85 | |
| 10. | Persentase kecamatan layak anak | % | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| 11. | Persentase keterlibatan perempuan di parlemen | % | 28,13 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | |
| 12. | Persentase kasus korban kekerasan yang mendapatkan layanan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 13. | Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan | % | 21,15 | 21,3 | 21,5 | 21,5 | 22 | 22 | 23 | |

## 4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra tercapai.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2024 – 2026 berpedoman kepada Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu tiga tahun mendatang sampai dengan tahun 2026. Indeks pembangunan manusia merupakan tolok ukur pembangunan daerah yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari indikator pencapaian sasaran dari DP3AP2KB Kota Bengkulu sebagaimana terlampir pada tabel **Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci** berikut.

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| 1. | 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | |
| 2. | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai | positif | Indeks | 0 | 55 | 60 | 62 | 63 | 66 | 68 | |
| 3. | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | positif | Persentase | 0 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | |
| 4. | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | positif | Persentase | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | |
| 5. | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | | % | 0 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | |
| 6. | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | | Indeks | 0 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | |
| 7. | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan | positif | Persentase | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 47 | 50 | |
| 8. | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | positif | Indeks | 0 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | |
| 9. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan | positif | % | 57,74 | 57,8 | 58 | 58 | 59 | 61 | 62 | |
| 10. | 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | | |
| 11. | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat | positif | Persentase | NA | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
| 12. | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya | positif | Persentase | NA | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
| 13. | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa | | Persentase | NA | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
| 14. | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) | positif | % | NA | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
| 15. | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | |
| 16. | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun | | Rata-rata | 2,16 | 2,16 | 2,14 | 2,08 | 2,05 | 2,02 | 2 | |

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| | | | Anak per Wanita | | | | | | | | |
| 17. | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) | positif | Persentase | 64,05 | 64,05 | 65 | 65,5 | 67 | 68 | 69 | |
| 18. | Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga | positif | Persentase | 67 | 67 | 69 | 69 | 70 | 73 | 75 | |
| 19. | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | negatif | % | 9,72 | 9,5 | 8 | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | |
| 20. | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) | | Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun | 14.3-14.3 | 14.3-14.3 | 14-14 | 13.9-13.9 | 13.7-13.7 | 13.5-13.5 | 13.2-13.2 | |

# BAB V
# PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Indikatif Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk periode 5 (Lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kota Bengkulu yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2025-2029.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Bengkulu. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Indikatif Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu yang telah dijabarkan dalan Renja dan RKA Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu yang telah dijabarkan dalan Renja dan RKA Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan Kinerja (LKj) Dinas . Laporan Kinerja (LKj) akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas di masa yang akan datang .

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra.

Bengkulu, 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu

**Hj. DEWI DHARMA, M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 19670505 199503 2 001